
**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA STUDI KASUS LEMBANG BARUPPU'
KECAMATAN BENTENG BATU KABUPATEN
TORAJA UTARA**

Jelvita¹, Helba Rundupadang², Dina Ramba³
Universitas Kristen Toraja, Sulawesi Selatan
e-mail: helba.rundupadang@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness level of the Lembang Income and Expenditure Budget (APBL) utilization in Lembang Baruppu', Benteng Batu District, North Toraja Regency, for the 2021–2024 period, and to identify the inhibiting factors that affect budget absorption. The research method employed is descriptive quantitative. The data used consists of secondary data sourced from the Realization Reports of the Income and Expenditure Budget of Lembang Baruppu' from 2021 to 2024. The data analysis technique was carried out by calculating the financial effectiveness ratio based on the comparison between the budget realization and the predetermined targets, referring to the standards of Kepmendagri No. 600.900-327 of 1996. The results of the study indicate that the revenue effectiveness level in Lembang Baruppu' for the 2021–2024 period falls into the highly effective and effective categories, with the average percentage of revenue realization closely reaching the budget targets each year. However, budget expenditure realization shows a fluctuating and declining trend until 2024. There is a budget variance in the form of Unspent Village Funds (SiLPA) caused by suboptimal expenditure absorption. The primary inhibiting factors in budget absorption include the limited competence and human resource quality of lembang officials in financial administration, technical constraints in adjusting work programs, and geographical challenges in executing physical development activities in the field.*

Keyword: *Budget Effectiveness, APBL, Village Funds, Lembang Baruppu', Budget Absorption.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) di Lembang Baruppu', Kecamatan Benteng Batu, Kabupaten Toraja Utara pada periode tahun 2021–2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi penyerapan anggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Baruppu' tahun 2021–2024. Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas keuangan berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan target yang telah ditetapkan, merujuk pada standar Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan di Lembang Baruppu' periode 2021–2024 tergolong dalam kategori sangat efektif dan efektif, dengan rata-rata persentase realisasi pendapatan mendekati target anggaran setiap tahunnya. Namun, pada sisi realisasi belanja menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun hingga tahun 2024. Terdapat selisih anggaran berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang disebabkan oleh tidak terserapnya anggaran belanja secara maksimal. Faktor penghambat utama dalam penyerapan anggaran ini meliputi keterbatasan kompetensi serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat lembang dalam penatausahaan keuangan, kendala teknis penyesuaian program kerja, serta hambatan geografis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di lapangan.

Kata kunci: efektivitas anggaran, apbl, dana desa, lembang baruppu', penyerapan anggaran.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan di tingkat lokal. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), difungsikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa (Undang-undang Nomor 6, 2014; Hehamahua, 2015). Tujuan mendasar dari pengalokasian anggaran transfer ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan di kawasan pedesaan melalui pemenuhan standar pelayanan minimum (Permendesa No. 22, 2016).

Dalam tatanan manajerial sektor publik, pengelolaan keuangan desa mencakup rangkaian siklus yang utuh dan sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (Permendagri No. 113, 2014). Tata kelola ini wajib berlandaskan pada asas pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin anggaran. Secara konseptual, pengelolaan keuangan didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas organisasi dalam memperoleh, mengalokasikan, dan mengelola aset untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan (Yudiana dalam Zhuhaeny et al., 2023). Oleh karena itu, tingkat efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi parameter utama dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah desa (Mahmudi, 2019).

Efektivitas itu sendiri mencerminkan seberapa baik suatu pekerjaan diselesaikan sesuai dengan

rencana, sasaran, biaya, dan mutu yang diharapkan (Khadlirin et al., 2021; Purnamasari et al., 2021). Dalam perspektif anggaran publik, kinerja dikategorikan efektif apabila output dan outcome yang dihasilkan dari program kerja mampu mencapai target penerimaan maupun pencapaian belanja yang ditetapkan (Mahmudi, 2019). Namun demikian, fakta di lapangan kerap menunjukkan keterbatasan dalam penyerapan anggaran, yang ditandai oleh fluktuasi realisasi penerimaan dan belanja serta munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Fenomena ini mengindikasikan adanya kendala operasional maupun teknis yang menghambat tercapainya kinerja anggaran secara optimal (Setiawan, 2018; Puspita, 2024).

Berbagai literatur empiris menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran di tingkat pemerintah desa masih dihadapkan pada sejumlah kesenjangan (*research gap*). Studi terdahulu mengungkap bahwa ketimpangan antara perencanaan dan realisasi belanja daerah kerap dipicu oleh keterbatasan kompetensi serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa dalam penatausahaan keuangan (Puspita, 2024; Habibi et al., 2024). Selain faktor SDM, kendala teknis penyesuaian program kerja, keterlambatan alokasi transfer dana dari pusat, hingga hambatan geografis lokal menjadi faktor kritis yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks wilayah pemerintahan adat seperti *Lembang* di Kabupaten Toraja Utara (Setiawan, 2018; Maun, 2020).

Kondisi obyektif di *Lembang Baruppu'*, Kecamatan Benteng Batu, Kabupaten Toraja Utara pada periode 2021–2024 memperlihatkan tren realisasi anggaran yang fluktuatif dan cenderung menurun pada komponen belanja. Meskipun tingkat efektivitas penerimaan

pendapatan berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, penyerapan belanja belum sepenuhnya maksimal sehingga menyisakan anggaran yang tidak terealisasi setiap tahunnya. Ketimpangan ini menegaskan pentingnya analisis rasio keuangan mendalam untuk mengevaluasi faktor internal maupun eksternal yang melatarbelakangi ketidakmaksimalan penyerapan dana tersebut.

Penelitian mengenai efektivitas anggaran desa ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang sangat tinggi. Secara akademis, studi ini memperkaya literatur manajemen keuangan publik dan akuntansi sektor publik, khususnya mengenai pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan rasio efektivitas berdasarkan kriteria Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996 (Steers, 2018; Mahmudi, 2019). Secara praktis, evaluasi ini sangat penting bagi Pemerintah Lembang Baruppu' untuk mengidentifikasi hambatan dalam siklus penganggaran, meminimalkan potensi efisiensi yang terbuang, serta memastikan dana desa dialokasikan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat (Akbar, 2017; Lestari et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) di Lembang Baruppu', Kecamatan Benteng Batu, Kabupaten Toraja Utara pada periode 2021–2024. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengkaji faktor-faktor penghambat utama yang menyebabkan timbulnya selisih antara anggaran belanja dan realisasi belanja (SiLPA) selama periode penelitian.

Artikel ini memberikan kontribusi teoretis berupa bukti empiris mengenai evaluasi kinerja keuangan publik pada entitas pemerintah desa adat (*Lembang*) berbasis data sekunder laporan realisasi anggaran. Secara praktis, kontribusi penelitian ini menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan di tingkat pemerintah

daerah Kabupaten Toraja Utara dan aparat Lembang Baruppu' dalam memformulasikan perencanaan anggaran yang realistis, menguatkan kapasitas SDM aparatur, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan desa (Gibson, 2017; Maun, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengkajian dan penggambaran kondisi aktual pengelolaan serta kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) berdasarkan data numerik objektif, tanpa melakukan pengujian hubungan sebab-akibat atau perlakuan eksperimental.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembang Baruppu', Kecamatan Benteng Batu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan dan direalisasikan selama periode semester genap tahun akademik 2025/2026, mencakup seluruh tahapan mulai dari studi literatur, pengumpulan dokumen, hingga analisis data keuangan periode tahun anggaran 2021 hingga 2024.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh dokumen laporan keuangan milik Pemerintah Lembang Baruppu', Kecamatan Benteng Batu, Kabupaten Toraja Utara. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria spesifik, yaitu berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) resmi periode empat tahun terakhir (2021, 2022, 2023, dan 2024) yang telah disahkan dan memuat komponen rinci realisasi penerimaan pendapatan serta belanja daerah. Penggunaan teknik sampel ini bertujuan untuk menjamin keabsahan, ketersediaan, serta konsistensi data

numerik yang dibutuhkan dalam penghitungan rasio keuangan antarperiode.

Instrumen utama penelitian ini mengacu pada formulasi indikator rasio kinerja keuangan sektor publik. Alat ukur yang digunakan mencakup Rasio Efektivitas Pendapatan dan Rasio Efektivitas Belanja dengan tolok ukur pengkategorian kinerja berdasarkan standar Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996, yaitu kategori sangat efektif ($\geq 100\%$), efektif ($90\%–99\%$), cukup efektif ($80\%–89\%$), kurang efektif ($60\%–79\%$), dan tidak efektif ($<60\%$). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Lembang Baruppu' tahun 2021–2024 yang diperoleh langsung dari kantor pemerintahan lembaga setempat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif berbasis rasio efektivitas keuangan (Mahmudi, 2019). Penghitungan efektivitas pendapatan dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pendapatan terhadap target anggaran pendapatan dikali 100%, sedangkan efektivitas belanja dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja dikali 100%. Data numerik diolah dan dihitung secara matematis menggunakan lembar kerja sistematis untuk mengevaluasi kinerja keuangan tahunan serta memetakan tingkat pencapaian penggunaan anggaran selama periode 2021–2024.

Pengujian diawali dengan analisis deskriptif data responden, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov*), uji multikolinearitas (melihat nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10), serta uji heteroskedastisitas (*Scatterplot* dan Uji Glejser). Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linear berganda dengan persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$, uji *t*

(parsial), uji *F* (simultan), uji korelasi Pearson (Sugiyono, 2018), serta analisis koefisien determinasi (*Adjusted R²*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lembang Baruppu' Benteng Batu

Lembang Baruppu' Benteng Batu merupakan wilayah pemerintahan setingkat desa yang terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Toraja Utara. Kondisi geografis dataran tinggi menjadikan sektor agraris sebagai penopang utama perekonomian lokal, di mana mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Dari aspek sumber daya manusia, rata-rata tingkat pendidikan aparatur lembang maupun masyarakat didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), meskipun tren partisipasi pendidikan tinggi di kalangan generasi muda terus mengalami peningkatan.

Dilihat dari dinamika kepemimpinannya, Lembang Baruppu' Benteng Batu dipimpin oleh Yohanis Pamian pada periode 2015–2021, sebelum dilanjutkan oleh Asmen dari tahun 2021 hingga sekarang. Secara administratif, wilayah pemerintahan Lembang Baruppu' Benteng Batu terbagi ke dalam lima dusun, meliputi Dusun Kole, Dusun Karongian, Dusun Tiruan, Dusun Panglimunan, dan Dusun Leppo' Batu.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata kelola pemerintahan di Lembang Baruppu' dijalankan secara kolaboratif oleh Kepala Lembang bersama perangkat lembang. Perangkat lembang mencakup Sekretaris Lembang yang membawahi Kepala Urusan (Kaur Tata Usaha & Umum dan Kaur Keuangan) sebagai unsur staf administrasi, Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan) sebagai pelaksana teknis operasional, serta para Kepala Dusun sebagai pelaksana wilayah. Penyelenggaraan pemerintahan ini berpedoman pada visi mewujudkan

masyarakat Lembang Baruppu' Benteng Batu yang beriman, adil, dan sejahtera melalui transparansi, perbaikan layanan dasar, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (2021–2024)

Evaluasi efektivitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Lembang Baruppu' Kecamatan Benteng Batu

periode 2021–2024 diukur melalui dua kriteria utama, yaitu efektivitas penerimaan pendapatan dan efektivitas pelaksanaan belanja.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pendapatan

Rincian analisis rasio efektivitas penerimaan pendapatan Lembang Baruppu' selama periode 2021 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Rasio Efektivitas Penerimaan Pendapatan Lembang Baruppu' (2021–2024)

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Selisih/Sisa (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2021	2.249.103.818	2.222.033.445	27.070.373	98,79%	Cukup Efektif
2022	1.867.565.423	1.776.399.684	91.165.739	95,11%	Cukup Efektif
2023	1.886.161.000	1.681.444.542	204.716.458	89,14%	Sedang
2024	1.628.795.900	1.625.870.024	2.925.876	99,82%	Cukup Efektif

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Analisis Efektivitas Realisasi Belanja

Tingkat keberhasilan penyaluran dan penyerapan anggaran belanja

keuangan Lembang Baruppu' selama periode empat tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 Rasio Efektivitas Realisasi Belanja Lembang Baruppu' (2021–2024)

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2021	2.265.680.487	2.107.982.105	157.698.382	93,04%	Cukup Efektif
2022	1.882.367.432	1.738.161.550	144.205.882	92,34%	Cukup Efektif
2023	1.914.135.143	1.644.512.400	269.622.743	85,91%	Sedang
2024	1.693.658.185	1.629.702.279	63.955.906	96,22%	Cukup Efektif

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan Keuangan Dana Desa di Lembang Baruppu' Benteng Batu kurun waktu 2021–2024 menunjukkan fluktuasi kinerja yang dinamis namun secara umum berada pada kategori cukup efektif. Fluktuasi ini tercermin dari pola pergerakan efektivitas penerimaan maupun belanja yang memiliki tren serupa: tinggi di awal periode (2021–2022), mengalami penurunan pada

pertengahan periode (2023), dan mencapai titik tertinggi pada akhir periode pengamatan (2024).

Penurunan tingkat efektivitas pendapatan (89,14%) dan belanja (85,91%) pada tahun 2023 dipengaruhi oleh kendala administratif dalam penyaluran dana transfer serta keterlambatan pelaksanaan beberapa program pembangunan fisik di tingkat dusun.

Tidak terealisasinya belanja sebesar Rp269.622.743 pada tahun 2023 disebabkan oleh kegiatan operasional atau proyek infrastruktur yang terhambat pelaksanaannya, sehingga sisa dana tersebut harus dialokasikan kembali sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Peningkatan signifikan pada tahun 2024—dengan efektivitas pendapatan mencapai 99,82% dan belanja 96,22% menunjukkan adanya perbaikan tata kelola serta pengawasan penganggaran oleh aparatur Lembang Baruppu'. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi internal antara Kepala Lembang, Sekretaris, para Kepala Urusan, hingga Kepala Dusun makin solid dalam mengawal realisasi program kerja sesuai target APB-Lembang.

Pembahasan

Pengelolaan keuangan Dana Desa di Lembang Baruppu', Kecamatan Benteng Batu, Kabupaten Toraja Utara periode 2021–2024 dievaluasi berdasarkan rasio efektivitas pada dua komponen utama APB-Lembang, yaitu efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan efektivitas pengelolaan anggaran belanja.

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan (2021–2024)

Rasio efektivitas pendapatan mengukur kemampuan Pemerintah Lembang Baruppu' dalam mengalirkan dan merealisasikan penerimaan pendapatan daerah/desa dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Tabel 3 Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Desa (2021–2024)

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2021	2.222.033.445	2.249.103.818	98,79%	Efektif (90–99%)
2022	1.776.399.684	1.867.565.423	95,11%	Efektif (90–99%)
2023	1.681.444.542	1.886.161.000	89,14%	Cukup Efektif (80–89%)
2024	1.625.870.024	1.628.795.900	99,82%	Efektif (90–99%)

Sumber: Laporan Keuangan Lembang Baruppu' (Diolah, 2026)

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja (2021–2024)

Rasio efektivitas belanja menggambarkan tingkat keberhasilan dan penyerapan alokasi dana belanja oleh

Pemerintah Lembang Baruppu' dalam merealisasikan program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat sesuai perencanaan APB-Lembang.

Tabel 4 Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Dana Desa (2021–2024)

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2021	2.107.982.105	2.265.680.487	99,04%	Efektif (90–99%)
2022	1.738.161.550	1.882.367.432	92,34%	Efektif (90–99%)
2023	1.644.512.400	1.914.135.143	85,91%	Cukup Efektif (80–89%)
2024	1.829.702.279	1.693.685.185	96,22%	Efektif (90–99%)

Sumber: Laporan Keuangan Lembang Baruppu' (Diolah, 2026)

Data pada Tabel 4, menunjukkan bahwa rasio penyerapan belanja pada tahun 2021 berada pada tingkat 99,04% (efektif), tahun 2022 sebesar 92,34% (efektif), dan tahun 2024 sebesar 96,22% (efektif). Penyerapan terendah terjadi

pada tahun 2023 dengan rasio 85,91% (cukup efektif).

Sama halnya dengan pendapatan, alokasi penyerapan belanja belum sepenuhnya mampu menyentuh target optimal 100%. Keterlambatan pencairan

transfer dana desa di tingkat awal berimbas secara berantai terhadap mundurnya jadwal eksekusi kegiatan operasional dan pembangunan infrastruktur di tingkat dusun. Akibatnya, sebagian program kerja tidak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran dan menyisakan dana yang terendap.

Sintesis dan Implikasi Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Dana Desa di Lembang Baruppu' Benteng Batu periode 2021–2024 secara umum tergolong efektif (rata-rata rasio berada pada kisaran 90–99%). Fluktuasi kinerja yang mencapai titik terendah pada tahun 2023 disebabkan oleh kendala administrasi alur dana transfer serta keterlambatan eksekusi kegiatan di lapangan.

Peningkatan kinerja pada tahun 2024 di mana efektivitas pendapatan menyentuh 99,82% dan belanja mencapai 96,22% membuktikan adanya evaluasi internal dan perbaikan tata kelola oleh aparatur lembang. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja menuju kategori sangat efektif ($\geq 100\%$), Pemerintah Lembang Baruppu' perlu mempercepat pemenuhan syarat administrasi penyaluran dana transfer serta menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih adaptif terhadap dinamika pencairan anggaran dari pusat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Lembang Baruppu', Kecamatan Benteng Batu, Kabupaten Toraja Utara periode tahun 2021 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pendapatan secara umum berada dalam kategori efektif. Capaian rasio efektivitas penerimaan pendapatan berada pada rentang yang fluktuatif, yaitu sebesar 98,79% pada tahun 2021 (efektif), 95,11% pada tahun 2022 (efektif),

mengalami penurunan menjadi 89,14% pada tahun 2023 (cukup efektif), dan membaik secara signifikan hingga mencapai 99,82% pada tahun 2024 (efektif). Kendati demikian, pencapaian target penerimaan belum pernah menyentuh kriteria sangat efektif ($\geq 100\%$) karena adanya kendala administratif serta keterlambatan alur transfer dana kas dari pemerintah pusat ke rekening desa yang berimbas pada penundaan pengakuan kas penerimaan.

Sejalan dengan kinerja pendapatan, penyerapan dan pelaksanaan alokasi anggaran belanja Dana Desa di Lembang Baruppu' periode 2021–2024 secara umum juga tergolong dalam kategori efektif.

Rasio efektivitas belanja mencatatkan angka sebesar 99,04% pada tahun 2021 (efektif), 92,34% pada tahun 2022 (efektif), mengalami penurunan hingga 85,91% pada tahun 2023 (cukup efektif), dan meningkat kembali menjadi 96,22% pada tahun 2024 (efektif). Belum optimalnya penyerapan alokasi belanja hingga menyentuh target 100% dipengaruhi secara berantai oleh keterlambatan pencairan dana transfer di awal tahun anggaran, sehingga beberapa program pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat dusun tidak dapat dieksekusi secara tepat waktu dan menyisakan sisa anggaran.

Secara keseluruhan, Pemerintah Lembang Baruppu' Benteng Batu telah mengupayakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*. Peningkatan kinerja yang cukup pesat pada tahun 2024 membuktikan adanya perbaikan serta evaluasi internal yang berhasil mengoptimalkan daya serap anggaran. Demi mempertahankan kinerja positif ini dan mencatatkan rasio sangat efektif ($\geq 100\%$) di masa mendatang, Pemerintah Lembang Baruppu' disarankan untuk mempercepat pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi penyaluran dana transfer, serta menyusun jadwal eksekusi program kerja yang lebih fleksibel dan

adaptif terhadap alur pencairan anggaran dari pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. T. (2017). *Pengaruh motivasi kerja terhadap efektivitas kerja karyawan PT. Handal Yesindo Sejahtera Surabaya* [Skripsi/Tesis, Universitas Jember]. Repository Universitas Jember.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2017). *Perilaku organisasi* (Edisi ke-10). PT. Indeks.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1965). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1979). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Purnamasari, R., Barus, I. N. E., & Kulsum, U. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak tahun 2018. *Jurnal Ekonomia*, 9(3), 141–151.
- Puspita, P. D. (2024). *Analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng* [Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha]. Repository Universitas Pendidikan Ganesha.
- Steers, R. M. (2018). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.